

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting atau ciri-ciri eksistensi sistem pemerintahan yang demokratis. Partisipasi masyarakat di sini/tidak hanya dilihat sebatas sebagai keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum, tetapi juga dalam berbagai aktivitas politik lainnya yang berimplikasi terhadap kepentingan orang banyak. Partisipasi masyarakat merupakan hal penting yang harus dilakukan di negara yang menganut paham demokrasi. Menurut Walge demokrasi hanya akan memiliki arti ketika masyarakat atau warga negara sebagai *Stakeholders* utama selalu dilibatkan dalam proses pembuatan semua jenis kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah.¹⁵ Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik adalah satu-satunya cara untuk menyakinkan kepada masyarakat bahwa pembuatan kebijakan publik dilakukan secara demokrasi.

Keuntungan pertama dalam partisipasi masyarakat adalah adanya peningkatan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah. peningkatan kualitas kebijakan pada gilirannya akan sangat menguntungkan bagi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.¹⁶ Yang kedua selain mendatangkan keuntungan bagi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan Menurut Smith dan Ingram juga akan memberikan manfaat bagi pemerintah. Sebab menurut mereka, dalam arti ada peningkatan kapasitas

¹⁵Dwiyanto Agus. 2005. *Menuju good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta Gadjadara University Press. Hal. 189

¹⁶ Ibid. hal. 190

kelembagaan ini akan berimplikasi pada peningkatan dukungan masyarakat terhadap pemerintah, misalnya melalui pemberian suara pada waktu pemilihan umum, manakala masyarakat melihat pemerintah sebagai lembaga yang mampu merepresentasikan kepentingan masyarakat.¹⁷

Senada dengan apa yang dikatakan oleh Smith dan Ingram di atas, beberapa ilmuwan politik mengemukakan seperti sample, Wabler, Kastenholz, dan Renn, sebagaimana dikutip oleh Glicken, mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan akan mendatangkan keuntungan, yaitu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi para pembuatan keputusan melalui pengembangan pembuatan kebijakan yang berkualitas, memberikan legitimasi yang lebih besar terhadap keputusan-keputusan yang dibuat karna partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas publik dalam proses pengambilan keputusan, serta memberikan citra positif sebagai suatu masyarakat yang demokrasi.¹⁸ Yang lebih penting dari pada itu semua, V. Denhardt dan B. Denhardt menyebutkan bahwa mmelalui partisipasi masyarakat yang luas dalam proses pembuatan kebijakan maka warga negara dapat membantu meningkatkan jaminan atau kepastian bahwa suara dan kepentingan individu maupun kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat didengarkan dan kemudian direspon oleh pemerintah secara adil.¹⁹

Cohen dan Uphoff Membagi partisipasi kedalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Tahap pengambilan keputusan yang diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapa. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud dalamk perencanaan kegiatan.

¹⁷ Ibid. hal: 189

¹⁸ Ibid. hal: 190

¹⁹ Op. Cit, hal:191

- b. Tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, karna inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata dari partisipasi masyarakat pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota program.
- c. Tahap penikmatan hasil, yang dapat di jadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar manfaat program dirasakan, berarti program tersebut berhasil mengenai sasaran.
- d. Tahap evaluasi dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.²⁰

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat. Pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Pangestus terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Faktor internal mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, bahkan pengalaman berkelompok.
2. Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sasaran akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek, jika sambuta pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu bila didukung dengan pelayanan pengelolaan kegiatan yang positif atau tepat

²⁰ Dalam file PDF dari Satria Mentari Tumbel tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa

dibutuhkan oleh sasaran atau masyarakat, maka sasaran tersebut tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam program.²¹

Selain dari pada itu faktor penghambat partisipasi masyarakat menurut Waston dan soetomo mengatakan ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain kendala yang berasal dari keperibadian individu salah satunya adalah ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif, karna rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri.²²

Tabel 2.1 Tipologi partisipasi berikut ini kiranya dapat membantu untuk membedakan antara partisipasi yang sesungguhnya dengan partisipasi yang semu. Tabel tipologi partisipasi masyarakat berdasarkan jenis partisipasi dan tingkat keterwakilan

Jenis partisipasi	Tingkat keterwakilan	
	Sempit	Luas
Palsu	Keputusan: kurang transparan, dibuat oleh pemerintah. Partisipasi: simbolik, hanya sengelintir orang yang terlibat.	Keputusan: dibuat oleh pemerintah. Partisipasi: simbolik meskipun melibatkan berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat
Pasir	Keputusan: dibuat oleh sekelompok elit pemerintah dengan mempertimbangkan masukan dari kelompok kepentingan yang terbatas. Partisipasi: hanya melibatkan kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh, sedangkan sebagian besar masyarakat tidak mempunyai kesempatan sama sekali.	Keputusan: dibuat oleh pejabat pemerintah dengan pengaruh yang sangat sedikit dari partisipasi masyarakat. Partisipasi melibatkan berbagai kelompok kepentingan namun peluang berpartisipasi disediakan dalam sesi yang sangat terbatas

Sumber: moynisan²³

²¹ Ibid. Pdf Satria Mentari Tumbel

²² Ibid. Pdf Satria Mentari Tumbel

²³ Op. cit. Dwiyanto. Agus. hal:191-192

Agar sedikit berbeda dengan yang dikemukakan oleh Moynihan, Wilcox membedakan level partisipasi masyarakat menjadi lima jenis, yaitu (1) pemberian informasi (2) konsultasi, (3) pembuatan keputusan bersama, (4) melakukan tindakan bersama, dan (5) mendukung aktivitas yang muncul atas swakarsa masyarakat.²⁴ Menurut Wilcox, pada level mana partisipasi masyarakat akan dilakukan sangat tergantung pada kepentingan apa yang hendak dicapai. Untuk mengambil kebijakan strategis yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak tentu masyarakat harus dilibatkan secara penuh. Sementara dalam pengambilan keputusan yang lebih bersifat teknis mungkin pemberian informasi kepada masyarakat sudah sangat memadai.²⁵

Berdasarkan konsep partisipasi masyarakat yang sudah dipaparkan di atas maka dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam mengkaji permasalahan tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Selain dari pada itu poin-poin yang dipaparkan tersebut juga dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan dan kegagalan dalam hal partisipasi masyarakat di desa yang sedang dikaji oleh peneliti.

B. Pengelolaan Dana Desa

Menurut Winarno Hamiseno pengelolaan adalah berasal dari kelola. Sedangkan kelola adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian.²⁶ Bertolak dari hal tersebut sedemikianly mengatakan bahwa

²⁴ Ibid. hal: 192

²⁵ Ibid. hal: 192

²⁶ Suharsimi AriKunto, (1996) *Pengelolaan Sebagai Sebuah Pendekatan Evaluatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), hal 8

pengelolaan didalam aspek pemerintahan disebut sebagai tata kelola yang merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengatur, mengelola suatu yang bertujuan agar dapat menghasilkan *output* yang sesuai. Dalam konteks tata kelola pemerintahan seluruh aspek pemerintahan baik politik, ekonomi, sosial, budaya maupun sumber daya alam yang ada memiliki model pengelolaan dengan menggunakan tata kelola pemerintahan yang baik.²⁷

Sama halnya dengan Dana Desa yang harus melalui beberapa serangkaian proses pengelolaan yang diantaranya perencanaan, pelaksanaan, dan pemantuan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik khususnya pada pemerintahan Desa. Untuk lebih detailnya tentang proses pengelolaan Dana Desa dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan sebuah proyeksi terhadap kegiatan apa aja yang akan dilakukan ke depannya. Proyeksi yang dibuat harus melalui pertimbangan yang matang berdasarkan kebutuhan yang ada. Oleh karna itu penganggaran Dana Desa harus melalui tahap perencanaan terlebih dahulu agar anggaran dapat terserap dengan baik yang sejalan dengan yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan Nasional pasal 1 ayat 1 bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.²⁸

²⁷ Sedarmayanti, 2003 *good governance pemerintah yang baik dalam rangka otonomi daerah upaya membangun organisasi efektif dan efisien melalui restrukturisasi dan pemberdayaan*, bandung, mandar maju.

²⁸ Undang-Undang Perencanan Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat 1

Kemudian tindakan dalam pembuatan perencanaan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas pembangunan Dana Desa tahun 2015 pasal 3 yang menjelaskan bahwa Dana Desa Diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.²⁹

Mengacu pada konsep yang dipaparkan tersebut maka apa bila dikaitkan dengan perencanaan pada anggaran Dana Desa maka terdapat beberapa tahapan didalamnya. Adapun tahapan –tahapan dari perencanaan dana desa meliputi:

Gambar 2.1 Preses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa



SUMBER: PERMENDAGRI NO 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa: Data diolah Peneliti.

Pertama, rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) yang didalamnya berisi visi dan misi dari Kepala Desa yang dibahas dalam forum musyawara Desa. Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) diaplikasikan selama enam tahun selama masa jabatan Kepala Desa. *Kedua*, Pemerintah Desa menyusun rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang

²⁹ Peraturan Menteri Desa nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas pembangunan Dana Desa tahun 2015 pasal 3

merupakan penjabaran dari (RPJMDes). RKPDes dilakukan melalui musyawara perencanaan pembangunan Desa (musrenbangdes) untuk jangka waktu satu (1) tahun yang kemudian ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). *Ketiga* adalah penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) yang mengacu pada RKPDes, kemudian ditetapkan dalam bentuk peraturan Desa. Anggaran pendapatan dan belanja Desa (Perdes APBDes), yang didalamnya terdapat besaran anggaran Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD).³⁰

Selanjutnya untuk menampung dan mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat maka dilakukan kegiatan pada forum musyawara rencana pembangunan Desa (Musrenbangdes). Selain itu dengan adanya forum musrenbang akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan anggaran dana desa.

Dari ketiga proses perencanaan tersebut didalamnya berisikan usulan kegiatan dari masyarakat terutama kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, mengacu dari tahapan tersebut maka nantinya akan dipergunakan peneliti untuk mengabrastrasikan permasalahan dan temuan dilapangan khususnya dalam proses perencanaan yang terjadi Desa Jambu Kabupaten Dompu. Selan dari pada itu juga akan dipergunakan menjadi acuan dalam mengkomparasikan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa. Sehingga akan didapatkan faktor penyebab tentang keterlibatan atau tidaknya masyarakat.

³⁰ Permendagri nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa tentang Preses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah sebagian usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan atau ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya³¹ mengacu pada konsep yang dijelaskan maka pelaksanaannya harus sejalan dengan perencanaan dana desa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pelaksanaan dana desa dalam hal ini harus dipergunakan atau dialokasikan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Desa seperti yang tertuang didalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 pasal 3 yang menjelaskan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaann masyarakat desa.³² Maka dalam hal ini pengalokasian Dana Desa secara prioritas merupakan indikator utama mewujudkan keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Karna bagaimanapun sebuah anggaran apabila mampu diprioritaskan sesuai ketentuan maka hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat Desa.

Penjelasan secara terinci tentang konsep pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

³¹ Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, , hal: 35

³² Loc. Cit, pasal 3

a. Pembangunan desa

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.³³ Adapun prioritas pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas pembangunan Dana Desa tahun 2015 pasal 5 adalah Pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar.
- b. Pembangunan sarana dan prasarana desa.
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal, dan
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.³⁴

Berdasarkan konsep pembangunan desa yang telah diuraikan diatas maka dapat digunakan sebagai bahasan analisis dalam mengkaji permasalahan tentang pengelolaan Dana Desa di Desa terkait untuk dikoparasasikan. Selain itu poin-poin yang dipaparkan tersebut juga dapat digunakan sebagai indikator keterlitaban atau tidaknya masyarakat dalam pembangunan Desa.

b. Pemberdayaan masyarakat desa

Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya menyebarkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkann pengetahuan sikap,keterampilan, perilaku, kemampuan, kesaadaran, serta memanfaatkan

³³ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 5

³⁴ Ibid, pasal 5

sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.³⁵

Kemudian penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atau sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM desa dan RKP desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup

- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa.
- b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya.
- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa.
- d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa.
- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
- f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan huta kemasyarakatan desa.
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.³⁶

Berangkat dari poin-poin yang disampaikan diatas dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan dana desa. Khususnya pada aspek pemberdayaan masyarakat. Selain dari pada itu melalui konsep tersebut dapat membantu peneliti dalam mengkomparasikan kegiatan yang dilaksanakan di Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.

³⁵ Ibid pasal 1 ayat 6

³⁶ Op. cit, pasal 11

3. Tahap Pemantauan (Monitoring) dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) adalah kegiatan yang sangat penting dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, karna dengan adanya monev, maka akan diketahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi program sosial yang diberikan.³⁷ Namun beberapa ahli memandang bahwa monitoring dan evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang berbeda namun adapun yang membedakan dari keduanya adalah sebagai berikut:

a. Monitoring

Menurut Marjuki dalam Suharto pemantauan dapat disama artikan dengan *monitoring* adalah serangkaian aktivitas pemantauan secara terus menerus terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.³⁸ Adapun tujuan dari adanya pemantauan (*monitoring*) adalah:

b. Evaluasi

Menurut suharto evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan atau program yang didasarkan pada hasil pemantauan atau monitoring. Terdapat dua tipe didalam evaluasi diantaranya adalah evaluasi terus menerus (*on-going evaluation*) dan evaluasi akhir (*ex-post evaluation*). Tipe evaluasi yang pertama dilaksanakan pada interval priode waktu tertentu, per tri wulan atau per semester selama proses implematasi. (biasanya pada akhir phase atau tahap suatu rencana). Sedangkan tipe evaluasi yang kedua dilakukan setelah implemetasi program atau kegiatan. berbeda dengan monitorng, evaluasi lebih difokuskan pada pengidentifikasian terhadap kualitas program. Evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau

³⁷ Ibid. hal: 117

³⁸ Suharto, Edi, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung hal: 18

penerapan program. Adapun tujuan dari evaluasi di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan.
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran.
3. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar rencana (externalities).³⁹

Sejalan dengan apa yang disampaikan pada konsep diatas maka dapat dikaitkan dengan penelitian ini dalam konteks untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Disisi lain melalui evaluasi juga dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi pada perencanaan dan pelaksanaan pada program terkait. Dengan demikian dapat membantu memudahkan peneliti dalam mengkomparasikan sampel mengenai pengelolaan dana desa pada Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.

C. Dana Desa

Desa memiliki kewenangan untuk menjalankan sendiri kegiatan pemerintahannya yang tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan.

1. Pengertian dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntungkan bagi desa yang ditranfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota dan

³⁹ Suharto, Edi, 200, *Membangun Masyarakat Memberdaya Rakyat*, Refika Aditama Bandung Hal: 119.

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.⁴⁰

2. Mekanisme pengaluran dana desa yang bersumber dari pada (APBN)

- a. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD yang selanjutnya dilakukan pembukuan dari RKUD ke RKD. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut: tahap I, pada bulan maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan tahap II, pada bulan agustus sebesar 40% (empat puluh persen). penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di RKUD.⁴¹
- b. Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh KPA BUN tranfe non dana perimbangan. Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah menteri c.q. direktur jendral perimbangan keuangan menerima: pertama, peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan: kedua, peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa: dan ketiga laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dari bupati atau wali kota.⁴² Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah menteri c.q. direktur jenderal perimbangan keuangan menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Penerimaan Negara Pasal 1 Poin 2.

⁴¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Bagian Ketiga Mekanisme Dan Tahap Penyaluran Pasal 14.

⁴² Ibid. Bagian Keempat Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD Pasal 15.

penggunaan dana desa tahap I menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).⁴³ KPA BUN tranfer non dana perimbangan melakukan penetausahaan, akutansi dan pelaporan keuangan atas penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD. Penatausahaan, akutansi dan pelaporan keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.⁴⁴

- c. Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD Penyaluraan dana desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati. Penyaluran dana desa tahap I dilakukan setelah bupati menerima: *pertama*, Peraturan Desa mengenai APBDDesa: *kedua*, laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.⁴⁵ Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa I dari Kepala Desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I menunjukan paling kurang Dana Desa tahap setelah digunakan sebesar 50% (Lima Pulu Persen).⁴⁶ Pelaksanaan penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang. Dalam hal ini terdapat desa yang tidak terjangkau layanan perbankan yang menyebabkan tidak dapat dibuka RKD. Bupati dapat mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Desa melalui peraturan bupati. Bupati menyampaikan Peraturan Bupati Kepada Menteri c.q Direktur Jendral perimbangan keuanngan.⁴⁷

⁴³ Ibid. pasal 16

⁴⁴ Ibid. pasal 17

⁴⁵ Ibid. Bagian Kelima Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Pasal 18.

⁴⁶ Ibid. Pasal 19

⁴⁷ Ibid. Pasal 20.

3. Peruntukan Dana Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.⁴⁸ Lebih lanjut penggunaan dana desa di atur dalam peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (MenDesPDTT) dalam penetapan prioritas pembangunan Dana Desa dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas pembangunan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Prioritas pembangunan Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.⁴⁹ Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas pembangunan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. Lingkungan pemukiman
 2. Transportasi
 3. Energi
 4. Informasi dan komunikasi

⁴⁸ Op.Cit. Bab V Penggunaan Pasal 19 ayat 1

⁴⁹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017 Bab III Prioritas Pembangunan Dana Desa Pasal 4

- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. Kesehatan masyarakat
 - 2. Pendidikan dan kebudayaan
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa yang meliputi:
 - 1. Usaha ekonomi pertanian berskala produksi untuk ketahanan pangan
 - 2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran
 - 3. Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan:
 - a. Kesiap-siagaan menghadapi bencana alam
 - b. Penanganan bencana alam
 - c. Penanganan kejadian luar biasa lainnya
 - d. Pelestarian lingkungan hidup
 - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam Musyawara Desa.⁵⁰

⁵⁰ Ibid. Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa Pasal 5

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.
- b. Pengembangan kapaitas masyarakat desa.
- c. Pengembangan ketahanan masyarakat desa.
- d. Pengembangan sistem informasi desa.
- e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dii bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang distabilitas.
- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- g. Dukungan kesiap-siagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya.
- h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama.
- i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- j. Pengembangan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.
- k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapka dalam masyawara desa.⁵¹

⁵¹ Ibid. Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pasal 17

4. Perencanaan dana desa

Perencanaan Dana Desa pada dasarnya merupakan beberapa tahapan atau proses perencanaan dalam pembuatan APBDesa. Perencanaan Dana Desa didasarkan pada kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kemudian penentuan program kegiatan tersebut disepakati dan di putuskan dalam musyawara desa, yang selanjutnya dimasukan sebagai rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan ,menjadi dokumen dalam penyusunan APBDes yang pada akhirnya akan ditetapkan sebagai Peraturan Desa.⁵²

5. Pelaksanaan Dana Desa

Secara konsep dasar pelaksanaan Dana Desa merupakan proses realisasi program-program pembangunan dan pemberdayaan yang di cover oleh Dana Desa dalam peraturan Desa tentang APBDes. Pelaksanaan dana desa dapat diartikan sebagai realisasi i program-program kegiatan yang digambarkan dalam Dana Desa.

6. Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa, dalam hal ini Kepala Desa memiliki tanggungjawab menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat.

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Kepada . Bupati atau wali kota.
- b. Bupati/walikota menyampaikan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa Kepada Menteri dengan tembusan Kepada

⁵² Dalam file PDF dari Kementrian PDTT Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam Negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan sebelum penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.⁵³



⁵³ Op. Cit. Bab VI; Pelaporan, Pasal 24